

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya masalah pada mutu perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS). Faktanya saat ini pertumbuhan perguruan tinggi begitu pesat, akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi semakin terbuka, kuantitas perguruan tinggi semakin meningkat tetapi tidak diikuti dengan pemerataan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 sebanyak 3.044 dan meningkat pada tahun berikutnya tahun 2021 jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 3.115, terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta dimana 96% yaitu sebanyak 2.990 merupakan perguruan tinggi swasta.<sup>1</sup> Berbagai perguruan tinggi swasta dalam bentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas tumbuh subur sampai ke pelosok daerah.

Situasi tersebut terlihat dari angka pengangguran sarjana semakin meningkat, banyak lulusan diploma dan sarjana yang tidak memiliki pekerjaan. Belum meratanya kualitas lulusan terlihat jumlah lulusan yang tidak siap pakai oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Diantaranya diukur dari kompetensi yang kurang memadai dalam bidang bahasa Inggris, bekerja sama tim, rendahnya kreatifitas dan kurang inovatif, yang mengakibatkan daya saing lulusan yang rendah dan angka pengangguran yang cukup tinggi sebesar 300.000. Sebuah laporan dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa universitas-universitas di Indonesia termasuk dalam kategori yang tertinggal. Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa antara dua puluh hingga dua puluh lima persen alumni perguruan tinggi di Indonesia harus menerima pelatihan sebelum mulai bekerja.

Sehingga terakumulasi membentuk *Unemployment Educated Population*, kondisi tersebut banyak terjadi di negara berkembang yang disebabkan karena;

---

<sup>1</sup> Data didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022.

1) Pendidikan diselenggarakan hanya untuk memenuhi politik semata, 2) Anggaran belanja nasional untuk sektor pendidikan rendah, 3) Pendidikan sebatas komoditi politik, 4) Pendidikan berorientasi formal dan 5) Terbatasnya informasi dan kebutuhan pasar kerja.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan perguruan tinggi. Kesenjangan antara jumlah lulusan dan daya serap lulusan menjadi pertanyaan besar bagi kualitas lulusan. Idealnya semakin banyak sarjana maka semakin meningkat daya saing masyarakat dalam memenuhi kebutuhan industry. Besarnya pengangguran menjadi indikator belum meratanya kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi yang bermutu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51 Undang Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>3</sup>

*Crosby* menyatakan bahwa ukuran mutu apabila memenuhi kesesuaian dengan yang disyaratkan dalam kata lain sesuai standar yang telah ditetapkan<sup>4</sup>. Dalam hal ini pendidikan tinggi mengacu pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari: standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat<sup>5</sup>. Tiga standar ini diuraikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan: isi, kompetensi lulusan, proses pembelajaran, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>6</sup>

Kendali mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Menurut Pasal 6 PP No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal

---

<sup>2</sup> Enas Dadang Suhardan, Riduwan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014). Hal.61

<sup>3</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi" (2012).

<sup>4</sup> Philip B Crosby, *Quality Is Free : The Art of Making Quality Certain* (New York: New American Library, 1979).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 ayat 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat 1.

(SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh badan akreditasi atau lembaga akreditasi mandiri.<sup>7</sup>

Salah satu indikasi mutu yang mudah dilihat berdasarkan capaian akreditasi. Potret mutu Perguruan tinggi melihat data berdasarkan Renstra Kemendikbud tahun 2020 terjadi disparitas mutu pendidikan tinggi masih tinggi. Capaian peringkat akreditasi untuk institusi dominan terakreditasi C sebanyak 70% dari seluruh Perguruan Tinggi Indonesia baik Perguruan Tinggi Kementerian, Pendidikan Tinggi Agama, Negeri dan Swasta.<sup>8</sup>

Disamping itu secara spesifik faktanya capaian kualitas PTKIS masih tergolong rendah terlihat dari sedikitnya PTKIS yang mendapat akreditasi A/unggul. Berdasarkan rekapitulasi Data dari BAN PT per 6 Agustus 2016. Peringkat akreditasi prodi PTKIS mayoritas C (1039 prodi), sebagian B (383 prodi) dan hanya 13 prodi yang memperoleh akreditasi A. Menurut data Diktis pada tahun 2016, terdapat 627 institusi, dan 147 yang terakreditasi. Berarti terdapat 480 institusi yang belum mengajukan akreditasi. Belum ada satu pun institusi PTKIS yang terakreditasi A, baru 7 perguruan tinggi yang mendapatkan nilai B, dan mayoritas, 140 PTKIS mendapatkan peringkat akreditasi C.<sup>9</sup>

Selain itu secara eksistensi memperhatikan pemeringkatan perguruan tinggi swasta PTKIS masih ketinggalan jauh. Berdasarkan *Ranking of World Universities*; WebMatriks sejumlah Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia masuk belum terlihat nampak di permukaan pada peringkat Nasional maupun Internasional. Adapun salah satu yang muncul dalam peringkat nasional yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menduduki peringkat nasional ke-16.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perguruan tinggi islam swasta memiliki potensi untuk meningkatkan mutu dan berdaya saing. Berdasarkan potret tersebut

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada pasal 6 ayat 1 point b1 dan b2.

<sup>8</sup> Efridayanti Nasution, "Strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara Dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta" (Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, 2021).

<sup>9</sup> S Sururin, "PETA PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM Sebuah Kajian Awal," *At-Taqaddum* 9, no. 1 (2017): 95, <https://doi.org/10.21580/at.v9i1.1783>.

<sup>10</sup> Pengumuman Pemeringkatan Perguruan Tinggi Edisi Juli 2022 Pada *Ranking Of World Universities*; Webmatriks.

budaya mutu di perguruan tinggi swasta masih masih tergolong belum menjadi perhatian yang serius. Masih banyak perguruan tinggi swasta yang abai terhadap pemenuhan mutu.

Sesungguhnya mutu pendidikan merupakan nilai istimewa dari sebuah lembaga pendidikan dan menjadi jaminan yang memiliki nilai jual sangat tinggi dan nilai guna bagi penggunanya.<sup>11</sup> Menurut Juran sebuah keistimewaan mutu harus terbebas dari; 1) kesalahan dalam penyelenggaraann/pengolahan (tingkatanya rendah), 2) bebas dari pemborosan 3) pelanggan tidak kecewa, 4) bebas dari keterlambatan dan 4)efisiensi.<sup>12</sup>

Menurut batasan Kemenristekdikti, kualitas pendidikan di perguruan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Diantaranya; struktur dan isi kurikulum, kebijakan institusi, kualifikasi dosen, iklim akademik, standarisasi proses dan mutu, dukungan komunitas, jaminan pembiayaan, dan dukungan institusional.<sup>13</sup>

Maka dari itu ukuran biaya pendidikan tidak hanya dinilai secara kuantitatif tetapi erat kaitannya dengan tatakelola yang berhubungan dalam pembiayaan tersebut. Karena sumber utama dari mutu adalah kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan diikuti dengan implementasi yang didukung oleh pembiayaan yang cukup, sehingga tanpa kemauan politik untuk menjadikan mutu sebagai prioritas yang harus didanai dalam penyelenggaraan pendidikan mutu pendidikan hanya sebatas wacana program.<sup>14</sup> Dibutuhkan komitmen *policy maker* untuk memprioritaskan kepentingan pemenuhan capaian mutu dibanding kepentingan lainnya.

Sehingga bicara masalah mutu tidak bisa lepas dari peran pembiayaan. Dari pendapat ahli tersebut peneliti menggambarkan bahwa capaian mutu dipengaruhi oleh faktor pembiayaan dan capaian mutu memberikan dampak pada nilai *income* pembiayaan (nilai jual) lembaga pendidikan.

---

<sup>11</sup> Dadang Suhardan, Riduwan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, hal.67.

<sup>12</sup> J.M. Juran, "The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality," *Quality Progress* 19, no. 8 (1986): 19–24.

<sup>13</sup> Sukamto, *Quality Assurance Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: Majelis Diktis Islam, 2002).

<sup>14</sup> Dadang Suhardan, Riduwan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*.

Tetapi faktanya perguruan tinggi di Indonesia masih dikategorikan rendah dalam manajemen operasional, kesehatan finansial dan akademik yang merupakan unsur-unsur dalam mendukung keunggulan dan daya saing.<sup>15</sup> Maka dari itu *problem reserach* dalam penelitian ini yaitu otonomi pembiayaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi capaian mutu lembaga pendidikan. Tiga alasan penting yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih fokus masalah pada otonomi pembiayaan pendidikan; 1) Pembiayaan merupakan faktor pertama dalam memperoleh keunggulan dengan mengidentifikasi biaya sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi<sup>16</sup> 2) Sumber pembiayaan pendidikan tinggi swasta sebagian besar bersumber dari masyarakat bukan dari anggaran pemerintah<sup>17</sup> sehingga perguruan tinggi perlu memiliki format strategis dalam pengelolaan sumber anggaran 3) Perguruan tinggi swasta memiliki otonomi dalam mengelola dan mengembangkan kelembagaan termasuk salahsatunya pendanaan pendidikan tinggi<sup>18</sup> maka dari itu diperlukan model otonomi pembiayaan yang berorientasi pada pemenuhan mutu pendidikan tinggi.

Sebagaimana hasil temuan penelitian Asep Kurniawan (2016) bahwa Struktur organisasi dan peran pimpinan memiliki kewenangan dan kebijakan tertentu dalam menentukan arah keberhasilan suatu organisasi atau perguruan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.<sup>19</sup> Sehingga pondasi dari pencapaian keberhasilan perguruan tinggi adalah pembiayaan pendidikan yang bersandar pada kebijakan pengelolaannya. Sebagaimana hasil temuan penelitian Anwar Abidin (2017) bahwa salah satu komponen penting dalam peningkatan mutu yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Jika itu dilakukan dengan transparan dan akuntabel, stakeholder akan percaya dan civitas akademika

---

<sup>15</sup> Nugroho, "Menimbang Daya Saing Perguruan Tinggi," Suara Merdeka, 2006, <http://www.suaramerdeka.com/harian/%0A0607/31/opi03.htm>.

<sup>16</sup> Paul E.Juras and Gary Cokins Blocher, Edward J., David E. Stout, "Cost Management: A Strategic Emphasis.," *McGraw-Hill International Edition* 6 (2013).

<sup>17</sup> Achmad Anwar Abidin, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)," *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017): 87, <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 22.

<sup>19</sup> Asep Kurniawan, "Disertasi Manajemen Biaya Pendidikan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penentuan Biaya Pendidikan Di Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Dan Universitas Pendidikan Indonesia)" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

termotivasi untuk meningkatkan mutu tri dharma dalam bidang mereka masing-masing.<sup>20</sup>

Tetapi semakin banyaknya perguruan tinggi berpotensi menyebabkan kualitas lulusan menurun, karena standarisasi kualitas lulusan hanya dilihat dari sudut pandang kuantitas, yaitu mengumpulkan jumlah mahasiswa yang paling banyak. Selain itu, penerapan otonomi kampus, di mana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan dalam pengelolaan, sehingga mereka cenderung mendapatkan dana yang cukup, tetapi terkadang mengabaikan kualitas..<sup>21</sup> Sehingga pergerakan pendanaan pendidikan diperlukan peninjauan secara *continue* untuk bergerak kepada arah capaian mutu pendidikan.

Berdasarkan Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi.<sup>22</sup> Faktanya, pendanaan pada perguruan tinggi swasta 90% bersumber dari masyarakat. meskipun ada dari pemerintah tetapi alokasi dan waktunya tidak tetap.

Situasi ekonometri masyarakat secara global dan kemampuan ekonomi masyarakat secara personal, dan pada faktanya Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) rata-rata memungut biaya pendidikan yang relatif rendah dibanding perguruan tinggi umum. Sedangkan sumber anggaran dari pemerintah berupa hibah penelitian, pengabdian masyarakat ataupun beasiswa untuk dosen dalam pengembangan sumber daya manusia juga sangat terbatas kuota dan akses, tidak semua PTKIS berkesempatan mendapatkannya dan frekuensinya sangat rendah. Jumlah PTKIS yang berada di wilayah Kopertais II Jawa Barat pada tahun 2022 sebanyak 148 Institusi dengan berbagai bentuk Universitas, Institut dan Sekolah

---

<sup>20</sup> Anwar Abidin, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)."

<sup>21</sup> Dadan F Ramdhan and Hariman Surya Siregar, "Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Ptkis)," *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.40>.

<sup>22</sup> Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1.

Tinggi serta berbagai corak dan letak geografis dengan kondisi mahasiswa rata-rata menengah ke bawah.<sup>23</sup>

Dari hasil penelitian disertasi ini bermaksud untuk menemukan sebuah model otonomi pembiayaan pendidikan Pada PTKIS yang berorientasi pada capaian mutu perguruan tinggi. Dimana model yang dimaksud yaitu model otonomi pembiayaan pendidikan tinggi swasta dengan sistem tata Kelola di bawah yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan, beragam bentuk PTKIS (Sekolah Tinggi/Institut/Universitas) serta kompleksitas kondisi keuangan pada masing-masing pendidikan tinggi islam. Tetapi bagaimanapun bentuk dan kondisinya tuntutan mutu perguruan tinggi tetap sama diharuskan mencapai kesesuai dengan minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Temuan penelitian ini diharapkan menjadi role model bagi PTKIS untuk dapat memenuhi tuntutan mutu sehingga *budgeting* pendidikan tinggi berorientasi pada capaian dan pengembangan mutu yang mengatarkan PTKIS mampu bersaing dengan pendidikan tinggi lainnya.

Terdapat kasus menarik yang ditemukan dari tiga lokus yang dipilih oleh peneliti yaitu; Universitas Islam Bandung (UNISBA), Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis dan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung.

*Pertama*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang telah berdiri sejak tahun 1958 telah memiliki 36 Prodi, terdiri atas 10 Fakultas pendidikan Strata satu (S1) dengan jumlah program studi sebanyak 24, Program Pascasarjana Magister sebanyak 10 prodi dan Program Doktorat sebanyak 2 prodi dengan capaian akreditasi prodi sebanyak 30% terakreditasi unggul sisanya baik sekali dan telah mendapatkan akreditasi Institusi Unggul pada Tahun 2022.<sup>24</sup> Disamping itu UNISBA menduduki ranking ke-35 dari 562 perguruan tinggi di Indonesia, peringkat 825 dari 5.830 perguruan tinggi di Asia dan 2.708 dari 14.131 perguruan tinggi di dunia. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa selain unggul di tingkat nasional UNISBA juga telah memiliki daya saing di tingkat

---

<sup>23</sup>Data diambil dari rekapitulasi laporan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kopertais Jawa Barat Tahun 2022.

<sup>24</sup>Data diambil dari PD Dikti dan laman web unisba <https://www.unisba.ac.id/> diakses pada 9 Mei 2023 pukul 02.06 WIB.

internasional. Ke-unggulan UNISBA juga tercermin dari berbagai aspek yang menunjukkan performa signifikan mulai dari kemegahan akademik, akreditasi, performa dosen, kualitas sumber daya manusia (SDM), kerjasama, kurikulum hingga prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Rektor UNISBA Prof Dr H Edi Setiadi, SH,MH menyatakan bahwa berbagai peningkatan kualitas UNISBA sejalan dengan program kerja dalam mencapai visi misi UNISBA maju, mandiri, terkemuka di tahun 2033 dalam pencapaian keagungan akademik yang didorong oleh sarana prasarana dan fasilitas serta upaya, dana, tenaga dan koneksi yang terus dikerahkan.<sup>25</sup>

*Kedua*, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Berdiri sejak 1972 telah memiliki program studi sebanyak 8 program studi (Prodi) terdiri atas; tujuh prodi strata satu (S1) dan satu program sarjana dua (S2) dengan capaian akreditasi prodi unggul dan baik sekali serta mencapai akreditasi institusi Baik Sekali (B) pada tahun 2018.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung yang telah berdiri sejak Tahun 1994 dengan jumlah program studi 5 program studi strata satu(S1) dengan capaian akreditasi baik sekali dan telah mencapai akreditasi institusi Baik Sekali (B) pada tahun 2021.<sup>27</sup>

Ketiga Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) merupakan PTKIS yang dikategorikan mampu memenuhi capaian mutu pendidikan tinggi, mengingatkan PTKIS lainnya masih banyak yang terakreditasi Baik (C) bahkan belum terakreditasi. Sehingga dari ketiga perguruan tinggi tersebut dapat diidentifikasi orientasi tata kelola pembiayaan dalam memenuhi mutu pendidikan tinggi.

Ketiga PTKIS tersebut selain secara ukuran mutu berdasarkan akreditasi telah mendapat peringkat akreditasi baik sekali dan unggul, juga secara eksistensi merupakan perguruan tinggi swasta yang terdepan di Lingkungan Kopertais Jawa Barat terbukti dari penghargaan-penghargaan yang didapat pada Rapat Koordinasi (RAKOR) Tahunan PTKIS selalu masuk nominasi PTKIS dengan berbagai

---

<sup>25</sup> M,Riefki.Warta Unisba. Edisi Idul Fitri 1444. "Komunikasi dan Humas (KomHumas) Unisba",hal.2.

<sup>26</sup> Data diambil dari pd dikti diakses pada 9 Mei 2023 pukul 02.25 WIB.

<sup>27</sup> Data diambil dari pd dikti diakses pada 9 Mei 2023 pukul 02.33 WIB.



keunggulan dalam berbagai bidang.<sup>28</sup> Perjalanan panjang yang ditempuh dalam membangun mutu tersebut tentu terdapat dinamika yang kompleks.

Lokus penelitian merupakan tiga PTKIS dengan bentuk yang berbeda yaitu Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi tetapi secara pengelolaan semua PTKIS di bawah naungan Yayasan. Dimana PTKIS memiliki otonomi tersendiri dalam mengembangkan pendidikan tinggi serta standar capaian mutu yang sama sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dari hasil eksplorasi keberagaman tersebut diharapkan menghasilkan referensi yang komprehensif dengan berbagai karakteristik keunggulan perguruan tinggi dalam pembiayaan untuk membangun mutu pendidikan tinggi sebagai analisis empiris untuk menemukan model otonomi pembiayaan dalam pencapaian mutu pada perguruan keagamaan islam swasta khususnya di Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, yaitu; Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) saat ini membutuhkan tata kelola alokasi pendanaan yang berorientasi pada capaian mutu pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia terindikasi manajemen operasional yang dijalankannya masih lemah, kesehatan finansial, kesehatan iklim akademik di kampus juga merupakan faktor penentu keunggulan daya saing.<sup>29</sup>

Pada dasarnya perguruan tinggi swasta memiliki kapasitas otonomi yang luas untuk melakukan pembaharuan secara signifikan dan *sustainable* untuk menjawab daya saing PTKI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada pasal 26 disebutkan bahwa otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Swasta(PTS) diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Dr H Ramdhani Wahyu Sururie, M.Ag,M.Si Bidang Akademik Kopertais II Jawa Barat Banten Pada Jum'at 2 Maret 2023 bertempat di Hotel Best Western Premier La Grande Kota Bandung dalam acara Workshop Evaluasi dan Akselerasi Akreditasi Prodi PTKI.

<sup>29</sup>Nugroho, "Menimbang Daya Saing Perguruan Tinggi."

peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Sehingga perguruan tinggi memerlukan pengembangan dalam proses manajemen kelembagaannya yang mencakup keseluruhan komponen strategi untuk membangun mutu pendidikan tinggi agar memiliki daya saing. Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Fakry Gaffar (2012) Perguruan Tinggi meski melakukan pembaharuan proses manajemen yang mencakup pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi.<sup>31</sup> Maka dari itu pengelolaan pembiayaan yang berorientasi terhadap mutu merupakan satu keharusan sehingga mutu PTKIS dapat terwujud.

*Research problem* penelitian ini yaitu otonomi pembiayaan dalam mencapai mutu PTKIS. *Research problem* tersebut berangkat dari *thesis statement* bahwa perguruan tinggi swasta memiliki otonomi yang luas dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang harus dikelola fungsi-fungsi manajemen pembiayaan yang meliputi; pengelolaan sumber dan mamfaat pendanaan secara strategis yang dijalankan dengan prinsip akuntabilitas melalui proses pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pendanaan pendidikan secara efektif dan efesien. Melalui tata kelola pembiayaan pendidikan yang dilakukan dengan strategis dan akuntabel mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang memuaskan, dan ketika manajemen pendidikan tinggi telah mampu memberikan layanan mutu yang memuaskan maka akan memberikan daya saing tinggi terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Akuntabilitas tinggi, tingkat kepercayaan masyarakat tinggi daya jual perguruan tinggi dan perguruan tinggi memiliki sumber daya yang memadai dengan diarahkan pada pembangunan mutu dan ketika mutu terwujud akan membentuk siklus terwujud dan mutu lembaga dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

---

<sup>30</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 26.

<sup>31</sup>M. Fakry Gaffar, *Dinamika Pendidikan Nasional: Isu, Tantangan Dan Prespektif Masa Depan* (Bandung: UPI PRESS, 2012).

Selanjutnya peneliti menyusun *research question* (pertanyaan-pertanyaan penelitian) sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan yang meliputi: jenis, sumber dan alokasi pembiayaan dalam konteks otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung?
2. Bagaimana sistem penganggaran meliputi: ketersediaan, manajemen pembiayaan dan distribusi pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung?
3. Bagaimana evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan dalam konteks otonomi Perguruan Tinggi Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung?
4. Bagaimana capaian mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung?
5. Bagaimana dampak otonomi pembiayaan pendidikan terhadap capaian mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung?

Rumusan masalah di atas disusun dengan mengacu pada beberapa teori yang terdiri dari *grand theory* manajemen pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

*Grand theory* pentingnya pendidikan bermutu berangkat dari teori ekonomi pendidikan J Wiseman (1987) bahwa; Pendidikan harus bermutu karena pendidikan merupakan asset Pendidikan menghasilkan ‘*outcomes*’, yaitu sumber daya manusia (*human capital*) yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan penghasilan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>32</sup> Sebagaimana teori *human capital* Edwinston and Malone (1997) “*human capital is*

---

<sup>32</sup> Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012). Hal 7.

*the individual knowledge, experience, capability, skill, creativity, innovations*". *Knowledge* seseorang meliputi pengetahuan mengenai teks akademik yang diperoleh melalui proses pendidikan.<sup>33</sup> Sehingga konsep *Human Capital* menurut Todaro (2015) menyatakan pentingnya seseorang melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang berupa investasi dalam bidang pendidikan.<sup>34</sup>

*Grand teory* manajemen pembiayaan pendidikan mengacu pada; 1) Jones, mengemukakan bahwa konsep pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga unsur yaitu; bagaimana dana diperoleh, dari mana sumbernya dan untuk apa/siapa dana dibelanjakan dengan tata kelola keuangan pendidikan terdiri dari tiga komponen utama. Yang *pertama* perencanaan keuangan (*financial planning*), yang berarti mengatur semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis dan tanpa dampak negatif. *Kedua*, pelaksanaan (*implementation involves accounting*) yang berarti menghitung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. *Ketiga*, evaluasi mencakup menilai bagaimana yang didanai mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> 2) C.Benson (Dalam Goerge Psacharopoulos, 1987) sistem pembiayaan pendidikan dilakukan dengan memenuhi kriteria; adekuasai (kecukupan), efisiensi dalam distribusi sumber dan pemerataan dalam disitribusi sumber-sumber tersebut.<sup>36</sup> 3) Nanang Fatah menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber pendanaan pendidikan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, kecukupan anggaran berkaitan dengan *Government's budget*, efisiensi berkaitan dengan otonomi manajemen yang diukur melalui *cost-benefits dan cost effectiveness*, sedangkan pemerataan terkait dengan sistem yang digunakan secara sentralisasi, desentralisasi ataupun bauran.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Edwinson & Malone, "Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier.," *Journal Of Technology Management And Innovation*, 1997.

<sup>34</sup> S. C Todaro, M. P., & Smith, *Economic Development* (Jakarta: Erlangga, 2015).

<sup>35</sup>T.H Jones, *Introduction To School Finance: Technique And Social Policy* (New York: : Macmillan Publishing Company Jones, 1985),20-22.

<sup>36</sup>Goerge Psacharopoulos.*Economic of education Research and Studies*.(New York:Addison-Wesley Pub Co, 1987) .423.

<sup>37</sup> Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2012). Hal 3.

4) Lipham; Manajemen keuangan, penganggaran, dan pembiayaan pendidikan mencakup pencarian dan penetapan sumber pendapatan anggaran, pengelolaan dana, laporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.<sup>38</sup>

*Grand teory* mutu pendidikan mengacu pada : 1) Crosby menyatakan bahwa ukuran mutu apabila memenuhi kesesuaian dengan yang disyaratkan dalam kata lain sesuai standar yang telah ditetapkan.<sup>39</sup> 2) Juran sebuah keistimewaan mutu harus terbebas dari; kesalahan dalam penyelenggarann/pengolahan (tingkatannya rendah), bebas dari pemborosan, pelanggan tidak kecewa, bebas dari keterlambatan dan efesiensi.<sup>40</sup>

### C. Tujuan Penelitian

Adapun deskripsi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasi perencanaan pembiayaan yang meliputi: jenis, sumber dan alokasi pembiayaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung.
2. Melakukan analisis sistem penganggaran meliputi: ketersediaan, otonomi manajemen pembiayaan dan distribusi pembiayaan pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung.
3. Melakukan analisis sistem evaluasi dan pertanggungjawaban Perguruan Tinggi Islam.
4. Identifikasi capaian mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung.

---

<sup>38</sup>Lipham SM. *The Principleship: Concepts, Competencies and Cosos*.(London: Longmar, 1985).

<sup>39</sup>Crosby, Philip B. *Quality Is Free : The Art of Making Quality Certain*. (New York: New American Library, 1979).

<sup>40</sup>Juran, J.M. “*The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality*”. (Quality Progress, 1986) no. 8: 19–24.

5. Identifikasi dampak otonomi pembiayaan pendidikan terhadap capaian mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung.

Tujuan akhir hasil penelitian disertasi ini bermaksud untuk menemukan sebuah model Otonomi Pembiayaan Pendidikan Tinggi Pada PTKIS yang berorientasi pada capaian mutu pendidikan tinggi. Misalnya *equalization model* atau nama model lain yang akan peneliti temukan dari hasil eksplorasi penelitian disertasi ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan *Impact* (dampak) terhadap secara teoritis maupun praktis untuk terwujudnya Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) yang bermutu: *pertama*, secara teoritis dari hasil penelitian disertasi ini berkontribusi terhadap khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam pada lembaga Pendidikan Tinggi yaitu dengan menemukan sebuah model Otonomi Pembiayaan Pendidikan Tinggi Pada PTKIS dalam memenuhi tuntutan mutu pendidikan tinggi. Sehingga dengan model konseptual tersebut mutu pendidikan tinggi akan terwujud. Terwujudnya mutu PTKIS memberikan dampak terhadap daya jual PTKIS yang berpengaruh terhadap daya saing perguruan tinggi sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam menyajikan layanan pendidikan yang berkualitas. *Kedua*, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap praktisi pendidikan tinggi. Dengan menyajikan role model bagi lembaga untuk dapat memenuhi tuntutan mutu sehingga *budgeting* pendidikan tinggi berorientasi pada capaian dan pengembangan mutu yang mengantarkan PTKIS mampu bersaing dengan pendidikan tinggi lainnya.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Konsep mutu pendidikan tinggi telah diatur dalam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pada tahun 1990 bahwa paradigma baru dalam manajemen pendidikan tinggi yang terdiri dari lima pilar yaitu: 1) kualitas

(*quality*) 2) Otonomi (*Autonomi*) 3) Akuntabilitas (*Acuntability*) 4) Akreditasi (*Acreditation*) dan 5) Evaluasi (*Evaluation*). Implikasi dari konsep paradigma tersebut memberikan otonomi kepada Lembaga pendidikan tinggi untuk menjalankan misi akademisnya, yaitu pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya muncul pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi yang dikeluarkan pada tahun 2003 oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas. Namun, konsep penjaminan mutu sebenarnya sudah ada jauh sebelum itu. Dalam perspektif pendidikan islam, mutu pendidikan merupakan hasil dari ajaran ihsan, yang berarti berbuat baik kepada semua orang karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan nikmat-Nya, dan tidak boleh berbuat buruk dalam bentuk apa pun. Ihsan berasal dari kata *husn*, yang artinya menunjuk pada kualitas yang baik dan indah. Menurut Kamus Besar, kata *husn* dapat digunakan untuk setiap kualitas positif, seperti kebajikan, kejujuran, indah, ramah, menyenangkan, selaras, dan sebagainya.<sup>41</sup> Quraisy Shihab dalam Qur'an surat Al-Qashas ayat 77 menyebutkan dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun di bumi ini. sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Sifat manusia kurang puas atas semua yang telah dimilikinya terkadang menimbulkan keinginan untuk menguasai dan mewujudkan kehendak dengan cara apapun.<sup>42</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ  
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.

<sup>41</sup>Muhammad Fuad, Rahmat Hidayat, Muhammad Fadhli, Mansur Hidayat Pasaribu, “Manajemen Mutu Pendidikan: Perspektif Al-Quran Dan Tafsir,” *Education Achievement: Journal of Science and Research* 1, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.51178/jsr.v1i1.14>.

<sup>42</sup> M Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an Volume 13* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017).

Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas/28:77).

Sehingga jika sesuatu membawa manfaat, itu dianggap bermutu, baik untuk individu maupun sosial, lembaga Pendidikan, kepada orang lain (stakeholder dan pelanggan), dan maksud dari memberikan kebaikan itu sendiri mampu memuaskan pelanggan.<sup>43</sup>

Dalam dokumen HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) atau strategi jangka Panjang pendidikan tinggi tahun 2003-2010, memiliki 3 kebijakan dasar: 1) daya saing bangsa (*The Nation's Competitiveness*) 2) otonomi (*Autonomy*) 3) Kesehatan (*Organization Health*). Penjamiman mutu merupakan suatu keharusan bagi perguruan tinggi. Pemilihan perguruan tinggi oleh masyarakat pada umumnya melihat berdasarkan hasil penilaian publik mengenai perguruan tinggi yang dijabarkan dalam suatu status (peringkat akreditasi).<sup>44</sup>

Ton Vroeljenstijn (2002) mengemukakan bahwa mutu (*quality*) yaitu kondisi utama untuk bertahan hidup (*survival*), berkompetisi, dan menarik (*attractiveness*).<sup>45</sup> Para ahli mengemukakan beberapa perbedaan dalam mempotret ketercapaian mutu, *pertama* mutu dapat dipandang sebagai kesesuaian antara produk dengan kebutuhan pasar,<sup>46</sup> *kedua* mutu dipotret dari penggunaan produk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,<sup>47</sup> *ketiga* *customer oriented* sepenuhnya memenuhi kepuasan pelanggan<sup>48</sup> dan *keempat* dikatakan bermutu apabila memenuhi kesesuaian dengan yang disyaratkan dalam kata lain sesuai standar yang telah ditetapkan.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Nur, M. (2016). Manajemen Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Administrasi Pendidikan*, 4(1), 91–103. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2611/2465>

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004).VI.

<sup>45</sup> Ton Vroeljenstijn, “Quality Assurance in Europe: Background and The State of Arts,” in *On Quality Assurance in Higher Education* (Yogyakarta: On Quality Assurance in Higher Education, 2002).

<sup>46</sup> W.Edward Deming, *Quality, Productivity, and Competitive Position* (Cambridge: MIT, Center For Advance Engineering Study, 1982).

<sup>47</sup> Juran, “The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality.”, 19-24.

<sup>48</sup> A.V.Feigenbaum, *Total Quality Control 4th* (New York: Mc Graw-Hill, 1991).

<sup>49</sup> Crosby, *Quality Is Free : The Art of Making Quality Certain*.



Implementasi mutu terdiri dari dua komponen utama: produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan produk sesuai dengan standar. Indikator *pertama* apabila produk memenuhi harapan dan berbeda dengan produk pesaing. Sedangkan indikator aspek *kedua* jika produk memenuhi standar mutu sehingga tidak ada cacat. Produk yang memenuhi standar ini dapat mengurangi kesalahan, pengerjaan kembali, pemborosan, pembayaran garansi, hasil yang lebih baik, dan kinerja yang sempurna.<sup>50</sup>

Ukuran mutu pendidikan dilihat dari berbagai aspek kemampuan daya saing lembaga sehingga mampu menghadapi berbagai perubahan yang mampu menjawab kebutuhan pengguna lulusan yang juga telah diatur dalam standar nasional pendidikan tinggi dan ketika suatu lembaga pendidikan telah mampu menetapkan dan mencapai standar mutu maka akan memiliki daya jual tinggi bagi masyarakat. *Customer oriented* dalam pendidikan tidak bisa diartikan dengan mengikuti kenyamanan pelanggan tetapi memiliki standar pelayanan yang mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi yang unggul.

Beberapa pernyataan ahli dalam mendefinisikan mutu yaitu; 1) *Crosby* menyatakan bahwa ukuran mutu apabila memenuhi kesesuaian dengan yang disyaratkan dalam kata lain sesuai standar yang telah ditetapkan.<sup>51</sup> 2) *Juran* sebuah keistimewaan mutu harus terbebas dari; kesalahan dalam penyelenggaraan/pengolahan (tingkatnya rendah), bebas dari pemborosan, pelanggan tidak kecewa, bebas dari keterlambatan dan efisiensi.<sup>52</sup>

Pendidikan tinggi yang bermutu didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, yang menyatakan dalam pasal 51 ayat 1 bahwa pendidikan tinggi yang bermutu menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pasal 52

---

<sup>50</sup>Deden Makbuloh, *Pendidikan Islam Dan Sistem Penjaminan Mutu* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>51</sup>Crosby, Philip B. *Quality Is Free : The Art of Making Quality Certain*. (New York: New American Library, 1979).

<sup>52</sup>Juran, J.M. "*The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality*". (Quality Progress, 1986) no. 8: 19–24.

ayat 2 menyatakan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan evaluasi sistem pendidikan tinggi.

Kesesuaian mutu dengan standar pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri dari: 1) Standar Nasional Pendidikan; 2) Standar Penelitian; dan 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan deskripsi SNPT dengan delapan standar nasional.<sup>53</sup>

Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang ditetapkan berdasarkan: 1) Ketetapan oleh pemerintah (*government*); 2) Disepakati bersama oleh *intern* perguruan tinggi yang dituangkan dalam visi misi Lembaga (*vision*).3) Dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*). Jadi, mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara perguruan tinggi dengan standar nasional dan standar yang dibuat oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang ditetapkan oleh Menteri, dan merupakan program sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Akreditasi. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan Kemenristekdikti, kualitas pendidikan di perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti struktur dan isi kurikulum, kebijakan institusi, kualifikasi guru, iklim akademik,

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pasal 2 dan 3, ayat 1 dan 2.

<sup>54</sup> Pasal 3, Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.

standarisasi proses dan mutu, dukungan komunitas, jaminan pembiayaan, dan dukungan institusional.<sup>55</sup> Sehingga salah satu faktor penentu dalam capaian mutu pendidikan tidak lepas dari peran pembiayaan pendidikan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) mengatur pembiayaan pendidikan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat, termasuk pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk mendanai pendidikan.

Tetapi pembiayaan pada pendidikan tinggi swasta memiliki karakteristik tersendiri, yaitu adanya otonomi penuh kepada pengelola perguruan tinggi dalam menentukan arah kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam menentukan arah dan membangun distingsi akademik pada masing-masing perguruan tinggi.

Berpedoman pada Menurut Pasal 24 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dijamin di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki wewenang untuk mengendalikan sendiri organisasi mereka sebagai tempat untuk memberikan pendidikan tinggi, melakukan penelitian ilmiah, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Universitas dapat memperoleh dana dari masyarakat, yang dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berikutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar yang seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk mengembangkan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi.

---

<sup>55</sup> Sukamto, *Quality Assurance Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Islam*.

Dengan demikian, batasan yang disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Maka dari itu pola, bentuk ataupun model otonomi pembiayaan pada perguruan tinggi swasta sangat dominan dalam menentukan arah capaian mutu pendidikan tinggi. Menurut Blocher (2013), langkah pertama yang sangat penting dari gagasan dasar manajemen biaya untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menemukan biaya dan penggerak biaya utama organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>56</sup>

Jones (1985) mengemukakan bahwa bahwa konsep pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga unsur yaitu; bagaimana dana diperoleh, dari mana sumbernya dan untuk apa/siapa dana dibelanjakan dengan tata kelola keuangan pendidikan dikelompokkan dalam 3 komponen utama, yaitu; *pertama*, perencanaan keuangan (*financial planning*) mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan. *Kedua*, pelaksanaan (*implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. *Ketiga*, evaluasi berupa penilaian terhadap pencapaian tujuan dari yang didanai.<sup>57</sup>

C.Benson (Dalam Goerge Psacharopoulos, 1987:423) sistem pembiayaan pendidikan dilakukan dengan memenuhi kriteria; adekuasai (kecukupan), efisiensi dalam distribusi sumber dan pemerataan dalam disitribusi sumber-sumber tersebut.<sup>58</sup>

Nanang Fatah menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber pendanaan pendidikan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, kecukupan anggaran berkaitan dengan *Government's budget*, efisiensi berkaitan dengan otonomi manajemen yang diukur melalui *cost-benefits dan cost effectiveness*, sedangkan pemerataan terkait dengan sistem yang digunakan secara sentralisasi, desentralisasi ataupun bauran.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Blocher, Edward J., David E. Stout, "Cost Management: A Strategic Emphasis."

<sup>57</sup> Jones, *Introduction To School Finance: Technique And Social Policy*.

<sup>58</sup> Goerge Psacharopoulos. *Economic of education Research and Studies*. (New York: Addison-Wesley Pub Co) .423.

<sup>59</sup> Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012). Hal 3.

Menurut Lipham (1985) manajemen keuangan, penganggaran, dan pembiayaan pendidikan termasuk mendapatkan dan menetapkan dana, memanfaatkannya, melaporkan, memeriksa, dan bertanggung jawab.<sup>60</sup> Sebagaimana dikemukakan Matin (2014) bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki arti sama dengan pengelolaan dana pendidikan, yang terdiri dari sistem penganggaran pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, menentukan alokasi anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan anggaran.<sup>61</sup>

Pendidikan harus bermutu karena pendidikan merupakan asset Pendidikan menghasilkan ‘*outcomes*’, yaitu sumber daya manusia (*human capital*) yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan penghasilan masyarakat, serta berdampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>62</sup> Sebagaimana teori *human capital* Edwinston and Malone (1997) “*human capital is the individual knowledge, experience, capability, skill, creativity, innovations*”. *Knowledge* seseorang meliputi pengetahuan mengenai teks akademik yang diperoleh melalui proses pendidikan.<sup>63</sup> Sehingga konsep *Human Capital* menurut Todaro (2015) menyatakan pentingnya seseorang melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang berupa investasi dalam bidang pendidikan.<sup>64</sup>

Berdasarkan landasan teori di atas menghasilkan kerangka konsep penelitian yang merupakan *navigasi* alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

---

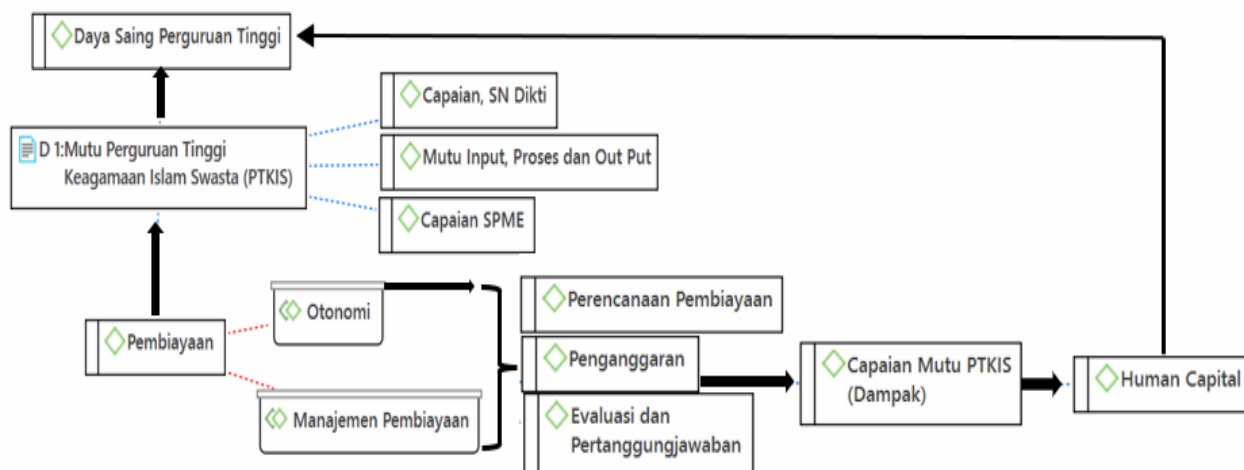
<sup>60</sup>Lipham Sm, *The Principleship: Concepts, Competencies And Cosos* (London: Longmar, 1985).

<sup>61</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>62</sup> Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Hal 7.

<sup>63</sup> Malone, “Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier.”

<sup>64</sup> Todaro, M. P., & Smith, *Economic Development*.



**Gambar 1.1. Kerangka Berpikir**

Deskripsi dari kerangka berpikir di atas bahwa, pertumbuhan perguruan tinggi semakin pesat, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkonsetrasi dalam mengembangkan pendidikan islam meski mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain agar mampu bertahan dan dapat terus mengembangkan khazanah keilmu pendidikan islam. Sehingga mutu PTKIS menjadi harga mutlak yang harus diwujudkan. Setidaknya terdapat dua indikasi pendidikan tinggi yang bermutu yaitu; daya saing lulusan dan capaian akreditasi lembaga pendidikan tinggi.

Mutu dapat terwujud dengan *support system* pembiayaan yang berorientasi pada pencapaian mutu. Sedangkan PTKIS memiliki otonomi yang luas dalam melakukan tata kelola dan pengembangan pembiayaan. perguruan tinggi swasta memiliki otoritas yang luas dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang berpihak pada perwujudan mutu. Serta dikelola dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan yang meliputi; pengelolaan sumber dan mamfaat pendanaan secara strategis yang dijalankan dengan prinsip akuntabilitas melalui proses pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pendanaan pendidikan secara efektif dan efesien.

Melalui tata kelola pembiayaan pendidikan yang dilakukan dengan strategis dan akuntabel mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang memuaskan serta melahirkan kepercayaan dari stakehoulder yang menjadi motivasi civitas akademika untuk melakukan peningkatan mutu dalam bidangnya masing-masing.

Dari hasil eksplorasi penelitian tersebut dapat menghasilkan model otonomi pembiayaan yang berorientasi terhadap mutu yang dikelola melalui fungsi-fungsi manajemen pembiayaan yang akuntabel dan mampu melahirkan motivasi mutu bagi stakeholder PTKIS sehingga dapat menjadi rujukan bagi PTKIS dalam mewujudkan mutu PTKIS dan menggiring paradigma baru “PTKIS Unggul dan Berkualitas” yang selama ini diidentifikasi memiliki mutu yang masih lemah.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan rujukan dalam menentukan fokus masalah penelitian dari keterbatasan penelitian terdahulu untuk menemukan *Novelty* hasil penelitian. Peneliti mengeksplorasi berbagai referensi Disertasi terdahulu ataupun jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Disertasi **Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Islam Swasta (Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Meningkatkan Input Dan Output UM Metro, IAIM NU Dan STIT Agus Salim Metro)**. Karya Gunawan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2016.

Hasil analisis data penelitian diperoleh penemuan sebagai berikut: Temuan umum tentang profil perguruan tinggi Islam swasta yang diteliti; Temuan khusus tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan mutu perguruan tinggi; Temuan lintas situs; Temuan tambahan yang berdampak; dan model teori mutu Baitul ikhsan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian mengenai elemen manajemen mutu seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampak dari manajemen kualitas perguruan tinggi. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

2. Disertasi **Manajemen Biaya Pendidikan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penentuan Biaya Pendidikan Di Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Dan Universitas Pendidikan Indonesia)** karya Asep Kurniawan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 2016.

Temuan penelitian yang dihasilkan dari tiga lokus perguruan tinggi ITB, UPI dan IPB sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum yaitu masing-masing memiliki standar komponen perhitungan dalam merumuskan biaya pendidikan yang akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap unit kerja di suatu perguruan tinggi. Sumber dana pembiayaan berasal dari 2 jenis yaitu pemerintah dan non pemerintah. Struktur organisasi dan peran pimpinan memiliki kewenangan dan kebijakan tertentu dalam menentukan arah keberhasilan suatu organisasi atau perguruan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Adanya keterbatasan dan berdasarkan perbandingan sumber dana yang dibutuhkan dengan dana yang ada membuat kurang maksimalnya pendanaan kegiatan perguruan tinggi. Dalam penyusunan anggaran terdapat banyak komponen yang perlu dirumuskan berdasarkan jenis dan prioritas kebutuhan. Dalam pelaksanaan anggaran pada dasarnya perlu diperhatikan bahwa proses pembiayaan di perguruan tinggi harus menyampaikan secara transparan dan akuntabel. Dampak anggaran memberikan penilaian peningkatan produktivitas pendidikan. Penelitian ini juga menghasilkan sebuah model hipotetik untuk manajemen biaya pendidikan universitas.

Perbedaan dengan penelitian tersebut pada aspek manajemen biaya pendidikan dalam penentuan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**3. Jurnal Karya Achmad Anwarabidin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya) . Jurnal Penjaminan Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Vol 3, No.1 Pebruari 2017.**

Hasil penelitian menunjukkan: Perencanaan pembiayaan pendidikan di kampus swasta menengah di Surabaya adalah tahap pertama dalam manajemen pembiayaan. Tahapan-tahapan ini termasuk tahap pra-rencana, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap elaborasi, tahap implementasi, tahap evaluasi, revisi, dan perencanaan kembali. Semua tahapan ini dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan RAB, yang kemudian diserahkan kepada yayasan atau pengelola kampus. Setelah assessment yayasan diputuskan dalam rapat yayasan, RAB kemudian disahkan untuk digunakan pada tahun anggaran. Salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel, stakeholder akan percaya, dan ini akan mendorong civitas akademika Tri Dharma Perguruan



Tinggi di perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya untuk meningkatkan kualitas dalam bidang mereka masing-masing.

Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada fokus masalah penelitian manajemen pembiayaan pada perencanaan serta transparansi dan akuntabilitas pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**4. Jurnal karya Ferdi W. P. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komponen yang mempengaruhi biaya pendidikan adalah sebagai berikut: a) kenaikan biaya; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan prosentasi siswa di sekolah negeri; d) peningkatan standar pendidikan; e) peningkatan usia anak yang meninggalkan sekolah; f) peningkatan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. 2) Jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung; c) biaya pribadi; d) biaya masyarakat; e) *monetary cost* dan *non-monetary cost*; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien, di mana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada kecepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut pada; Biaya pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: jenis biaya pendidikan; dan model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**5. Jurnal Karya Dadan F Ramdhan, Hariman Surya Siregar. Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Jurnal Perspektif, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 3 No. 1 Mei 2019.**

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam tahap perencanaan terdapat beberapa tahapan kebijakan yang ditempuh: Penataan, Penertiban, dan Penguatan Kelembagaan; Standarisasi Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam; Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen (Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi), pengembangan Program Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, pengembangan Program Bidang Ketenagaan, pengoptimalan Program Bidang Bantuan. dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu : Membangun strategi pengembangan, menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan stakeholder, membangun pusat maju kompetitif, mengembangkan ICT (Information and Communication Technology), membangun profesionalisme, menjamin kualitas, dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder, bekerja sama dengan institusi lain, dan menanamkan komitmen Islam pada civitas akademika. Pengembangan keilmuan, model konseptual perencanaan strategik pengembangan mutu akademik, konsep manajemen mutu, dan konsep manajemen mutu berbasis Qur'ani merupakan jenis evaluasi yang digunakan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut aspek manajemen mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jawa Barat yang terdiri atas; perencanaan, pengembangan dan evaluasi manajemen mutu perguruan tinggi. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**6. Disertasi Suwarni. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di UNIVED, UMB, dan UNIHAZ Bengkulu). Disertasi Manajemen Pendidikan PPs UNINUS Bandung. 2014.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi melakukan proses perencanaan pembiayaan. Proses ini termasuk menentukan sasaran, menetapkan strategi, dan membuat rencana kegiatan. Dengan membuktikan kepemilikan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pengajar Perguruan Tinggi, pembiayaan telah digunakan dan dilaksanakan, yang merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan. Selama pelaksanaan RAPB, pengawasan pembiayaan terus dilakukan di tiga universitas. Ini memungkinkan untuk menghasilkan sumber pemasukkan baru seperti mencari kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank baru, atau kebijakan baru seperti menerapkan penghematan pengeluaran pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk mengurangi pemborosan. Faktor-faktor yang mendukung proses peningkatan kualitas perguruan tinggi termasuk evaluasi yang baik terhadap proses pendidikan, evaluasi yang baik terhadap kinerja dosen dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap semester. Selain itu, kampus

memberikan kesempatan untuk interaksi antar dosen, baik secara formal maupun nonformal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di perguruan tinggi tidak berarti hasil yang buruk, bahkan jika pembiayaan belum digunakan secara maksimal. Di antara hasil yang dicapai adalah bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sangat mendukung dalam dunia kerja, memiliki etos kerja yang baik, dan sangat termotivasi untuk terus belajar.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, elemen manajemen pembiayaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan komponen yang mendukung proses peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**7. Disertasi Jaenudin. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Pendidikan Islam PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2016.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Perencanaan pembiayaan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan konsep manajemen dan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU); 2)Pengorganisasian pembiayaan pendidikan tinggi dilakukan dengan menggunakan tiga pola, yaitu kelembagaan, otonomi pendidikan tinggi, dan efisiensi dan efektivitas; 3)Proses pembiayaan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menggunakan dana mahasiswa dan sumber lain yang diaudit secara internal dan eksternal. dan 4)Pengawasan pembiayaan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup semua aspek manajemen keuangan, seperti perencanaan, pengorganisasian, operasional, dan pelaporan. Studi ini menemukan bahwa konsep manajemen pembiayaan pendidikan tinggi yang didasarkan pada manajemen BLU dapat membantu perguruan tinggi maju ke PTAIN jika semua pengampu kebijakan dan pengelola keuangan serta sivitas akademik berkomitmen.

Perbedaan dengan penelitian tersebut aspek manajemen pembiayaan Perguruan Tinggi Negeri yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan peneliti pada aspek

otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

**8. Disertasi Nurhamzah. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor). Pendidikan Islam PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, sumber-sumber pembiayaan di kedua pesantren berasal dari pemerintah, orangtua, dan lembaga donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kedua, implementasikan Kedua pesantren telah menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu secara efektif dan konsisten. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan peningkatan pembiayaan pendidikan. Ketiga, ada dua kategori faktor pendukung dan penghambat untuk menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren: faktor internal dan eksternal. Keempat, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu secara signifikan meningkatkan output dan hasil pembiayaan pendidikan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut aspek manajemen pembiayaan terhadap capaian mutu pada pondok pesantren yang meliputi; Anggaran pendapatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, perbaikan pembiayaan, dan faktor pendukung dan penghambat pembiayaan berbasis mutu untuk pondok pesantren. Sedangkan peneliti pada aspek otonomi pembiayaan pendidikan tinggi dalam mencapai mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS).

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu yang disebutkan di atas peneliti menemukan *state of art* sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian otonomi pembiayaan terhadap capaian mutu perguruan tinggi. Sedangkan untuk menemukan gap penelitian (*research gap*) dilakukan melalui analisis meta data bibliometrik. Seperti yang telah disampaikan masalah utama penelitian ini yaitu mutu pendidikan tinggi, hasil analisis *Open Knowledge Maps* penelitian terdahulu penelitian yang beririsan dengan mutu pendidikan

tinggi<sup>65</sup> diantaranya; pembiayaan<sup>66,67</sup>, manajemen pendidikan<sup>68</sup>, sistem penjaminan mutu<sup>69</sup>, otonomi<sup>70</sup> dan budaya organisasi.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini aspek yang diambil dalam mencapai mutu pendidikan tinggi yaitu tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi.



**Gambar 1.2. Open Knowledge Maps Manajemen Mutu Pendidikan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang ditemukan melalui *Publish or Perish* yang divisualisasi melalui Vosviewer memberikan informasi keterkaitan penelitian pembiayaan dengan mutu sebagai berikut; 1) penelitian pembiayaan hubungannya dengan mutu, 2) pembiayaan hubungannya dengan peningkatan mutu, 4) mutu hubungannya

<sup>65</sup>[Overview Of Research On Mutu Pendidikan Tinggi - Open Knowledge Maps](#)

<sup>66</sup>I S (Irna) Shaylide, "Pengaruh Mutu Layanan Akademik Dan Biaya Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa," *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 2014, <https://www.neliti.com/publications/73573/pengaruh-mutu-layanan-akademik-dan-biaya-pendidikan-terhadap-kepuasan-mahasiswa>.

<sup>67</sup>Anwar, "Investasi Pendidikan (Suatu Fungsi Untuk Pendidikan Yang Bermutu)," *Al-Fikrah : Jurnal Kependidikan Islam*, 2013, 1–10.

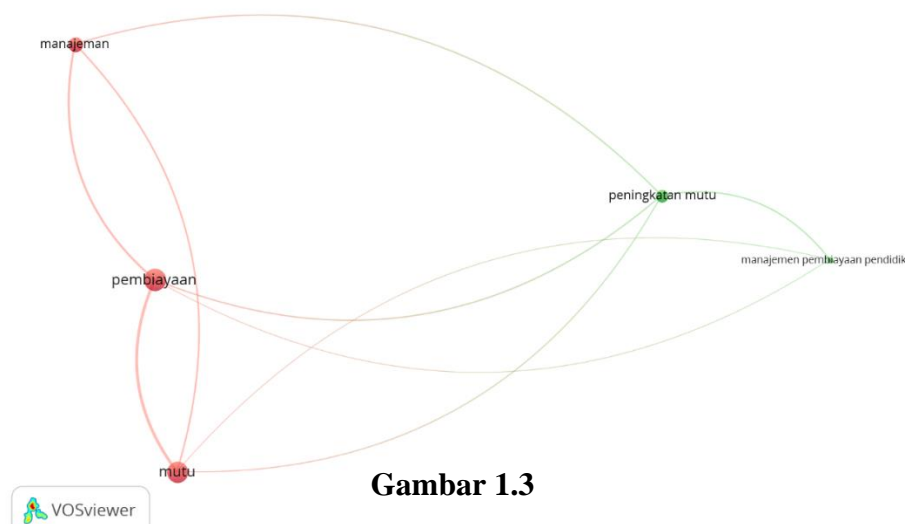
<sup>68</sup>A Lukman, B Modding, And A Gani, "Capacity Management Building Dalam Memfasilitasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ...," *Jurnal Ilmiah ...*, 2023, <Http://Lonsuit.Unismuhluwuk.Ac.Id/Emor/Article/View/2410>.

<sup>69</sup>Ni Nyoman Lisna Handayani And Ni Ketut Erna Muliastri, "Determinasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi," *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya; Vol 6, No 2 (2022); 110-120; 2721-2394; 2580-7544*.

<sup>70</sup>Rusmini. 2014. "Konsep Otonomi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi," December. <http://repository.uinjambi.ac.id/57/>.

<sup>71</sup>Robby Shadri, Isjoni Isjoni, and Azhar Azhar, "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau," *Jurnal Pendidikan Tambusai; Vol. 5 No. 1 (2021); 2021; 1571-1576; 2614-3097; 2614-6754*, 2021, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1141>.

dengan manajemen pembiayaan, 3) manajemen pembiayaan pendidikan hubungannya dengan peningkatan mutu. Gari tebal dan posisi terdekat pada visualisasi di bawah ini memberikan informasi hubungan penelitian yang paling banyak dilakukan.



**Gambar 1.3**

### **Research Gap Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan**

Temuan penelitian lain pada sepuluh tahun terakhir (2013-2023) diambil dari artikel penelitian terindeks scopus ditemukan tema penelitian pembiayaan pendidikan tinggi cukup banyak dilakukan dengan aspek lain yang berkaitan dengan; peraturan, kebijakan pendidikan tinggi (*higher education policy*),<sup>72</sup> sistem pendidikan tinggi (*higher education system*)<sup>73</sup> dan ditemukan bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi (*higher education policy financial*)<sup>74</sup> maka dari itu erat kaitannya dengan kebijakan, tata Kelola dan sistem pendidikan tinggi. Mempertimbangkan bahwa pembiayaan pendidikan diukur melalui *cost-benefits dan cost effectiveness* yang berkaitan dengan otonomi manajemen melalui sistem yang digunakan baik secara sentralisasi, desentralisasi ataupun bauran.<sup>75</sup> Model otonomi pembiayaan pendidikan tinggi merupakan *research novelty* dalam

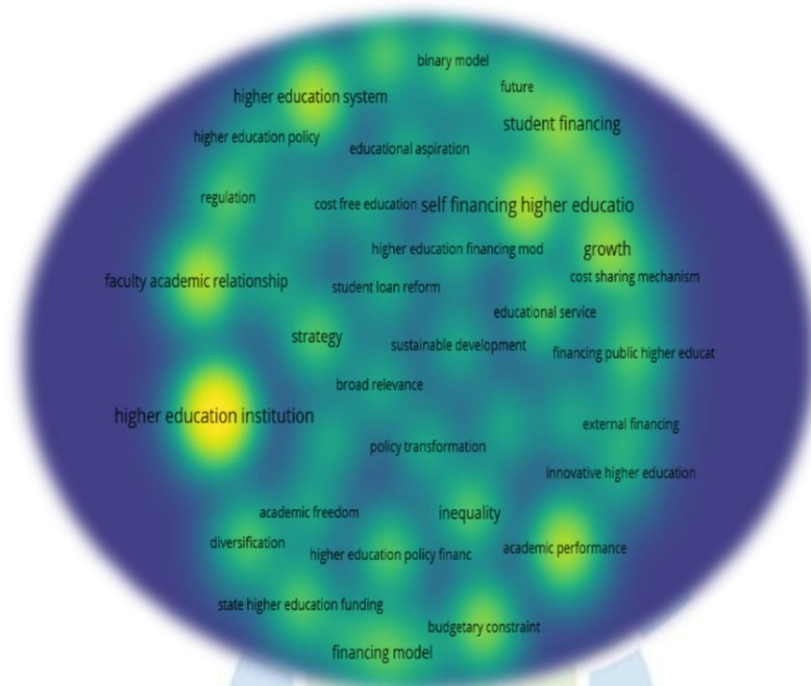
<sup>72</sup> M Lust, "Academic Identity as a Discursive Resource for Resistance: The Case of Quality Management in German Higher Education Institutions," *Higher Education Policy* 32, no. 1 (2019): 49–69, <https://doi.org/10.1057/s41307-018-0116-6>.

<sup>73</sup> M A Aldhobaib, "Quality Assurance Struggle in Higher Education Institutions: Moving towards an Effective Quality Assurance Management System," *Higher Education*, 2024, <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01182-5>.

<sup>74</sup> B Waluyo, "Balancing Financial Autonomy and Control in Agencification: Issues Emerging from the Indonesian Higher Education," *International Journal of Public Sector Management* 31, no. 7 (2018): 794–810, <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2017-0272>.

<sup>75</sup> Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Hal 3.

penelitian ini, dimana peneliti bermaksud menemukan model hasil penelitian yang ditemukan.



**Gambar 1.4 Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi**